

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BAYUNGGEDE, DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

Oleh :

I Wayan Sonder<sup>1</sup>

Fatrisia Yulianie<sup>2</sup>

## Abstrak

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata mutlak diperlukan, karena masyarakat setempat sebagai kelompok yang pertama terkena dampak baik yang positif maupun negatif. Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Bayunggede. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul berupa data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengelolaan desa wisata bayunggede sudah menerapkan pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan POKDARWIS Bayunggede yang beranggotakan warga masyarakat setempat. Pengelolaan Desa Wisata Bayunggede oleh POKDARWIS belum berjalan optimal jika dilihat dari fungsi pengelolaan/manajemen. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan sumberdaya manusia, dana, dan kemampuan manajerial.

**Kata kunci:** potensi, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan, desa wisata.

## Abstract

*Community empowerment in the management and development of tourist attraction is absolutely necessary, because the local community as the first group is affected both positively and negatively. The purpose of this research focus is to find out the potential and forms of community empowerment in the management of Bayunggede Tourism Village. Data collection techniques used are interviews, observation and literature study. The data collected in the form of qualitative*

---

1 Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar

2 Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional

*data was analyzed by descriptive qualitative data analysis techniques. The results of the study found that the management of the tourism village in Bayunggede had implemented community empowerment with the establishment of POKDARWIS Bayunggede which consisted of local community members. The management of the Bayunggede Tourism Village by POKDARWIS has not run optimally when viewed from the management / management function. This is inseparable from the limitations of human resources, funds, and managerial capabilities.*

**Keywords:** *potential, community empowerment, management, tourism village.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan perkembangan pariwisata di berbagai negara di belahan dunia sangat didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi telah memudahkan manusia untuk melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan waktu yang lebih cepat. Selain itu kemajuan teknologi informasi memungkinkan akses informasi khususnya informasi pariwisata dengan lebih cepat dan luas, sehingga seseorang akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang pariwisata suatu negara. Di Indonesia pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan dalam menghasilkan devisa negara. Hal tersebut didukung dengan besarnya potensi pariwisata yang dimiliki, oleh Indonesia sebagai Negara kepulauan, dengan keanekaragaman budaya masyarakatnya. Pembangunan pariwisata Indonesia dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang telah ditetapkan.

Pembangunan pariwisata di Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mempunyai tujuan antara lain: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa. Tujuan pembangunan pariwisata Indonesia tidak hanya diprioritaskan untuk kepentingan ekonomi, tapi juga untuk pelestarian sumber daya, meningkatkan kesatuan bangsa dan persahabatan antar bangsa. Pembangunan pariwisata indonesia harus selalu mengedepankan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memberi manfaat positif bagi kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terbaik dunia. Destinasi wisata Bali dikenal dengan keindahan alam dan keunikan budaya

masyarakat, serta keramahan masyarakat. Potensi-potensi wisata tersebut telah dikembangkan menjadi suatu daya tarik wisata yang didukung dengan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan pariwisata Bali telah mampu menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan liburannya di destinasi wisata ini.

Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali yang terletak dibagian tengah Pulau Bali dan tidak mempunyai wilayah laut. Walaupun tidak memiliki wilayah laut, daerah ini juga memiliki potensi wisata alam yang sangat indah yaitu panorama Gunung dan Danau Batur. Keindahan alam Gunung Api Batur telah ditetapkan sebagai situs warisan budaya geopark dunia (global geopark) yang pertama di Indonesia oleh UNESCO. Selain itu potensi wisata yang dimiliki adalah potensi wisata perdesaan, yang dapat dikembangkan dengan pengembangan desa wisata terpadu yang pengembangannya melibatkan unsur potensi alam dan budaya secara utuh. Pengembangan desa wisata diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Desa Bayung Gede merupakan salah satu desa di kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang termasuk kawasan Geopark Dunia Gunung Api Batur telah dikenal dengan berbagai potensi wisata baik yang berupa potensi alam dan budaya masyarakatnya. Dari sisi potensi alam Desa Bayunggede dikenal sebagai salah satu daerah penghasil buah jeruk dan sayur mayur. Selain potensi alam desa ini dikenal dengan keunikan social budaya masyarakatnya. Keunikan budaya Desa Bayunggede telah menarik bagi orang asing untuk berkunjung sejak jaman penjajahan tepatnya tahun 1940 sudah dikunjungi oleh antropolog asing yang bernama Margaret Mead bersama suaminya Antropolog Gregory Bateson pernah tinggal di Desa Bayung Gede dan banyak menulis artikel-artikel yang dimuat oleh majalah ilmiah seperti *The Yale Review* (1940) dan *The American Scholar* (1942), yang secara tidak sengaja menggaungkan nama Bali. Desa Bayunggede juga merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Wisata Penglipuran yang telah dikenal sebagai daya tarik wisata pedesaan terbersih di Dunia.

Desa Wisata Bayunggede telah ditetapkan sebagai salah satu Desa Wisata yang ada di Kabupaten Bangli melalui Peraturan Bupati Bangli No. 16 Tahun 2014 tentang desa wisata. Pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Bayunggede telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten serta masyarakat. Pengembangan Desa Wisata Bayunggede telah dilakukan dengan penataan lingkungan fisik, pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, seperti penataan lingkungan desa, pembangunan loket, pembangunan tempat parkir, dan toilet bagi wisatawan serta warung pariwisata. Pengembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat belum mampu menjadikan Desa Wisata Bayunggede sebagai salah satu daya tarik wisata unggulan di Kintamani dan memberi manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya pengelolaan Desa Wisata Bayunggede. Penelitian ini menitikberatkan pada peluang dan tantangan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata bayunggede di

Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Melalui penelitian ini diharapkan akan teridentifikasi peluang dan tantangan sebagai masukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola Desa Wisata Bayunggede.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

Menurut Payne (dalam Pitana, 2011: 2), pemberdayaan adalah proses untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan, atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial di dalam mengambil keputusan dan tindakan tersebut.

Konsep pemberdayaan muncul sebagai usaha untuk m e m b e r i k a n masyarakat lokal atau masyarakat marginal agar terlepas dari ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) (Pitana, 2011: 3).

Menurut World Bank 2002 (Pitana, 2011: 4), pemberdayaan pada dasarnya berisikan empat elemen pokok yaitu:

1. *Access to information* (akses terhadap komunikasi), karena informasi adalah modal dalam pengembangan kemandirian;
2. *Inclusion/participation* (penyertaan/partisipasi), yaitu kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasilnya sangat penting bagi masyarakat lokal;
3. *Accountability* (akuntabilitas). Akuntabilitas berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dalam pengembangan kebijakan, pelaksanaan di lapangan, maupun pemanfaatan sumber daya termasuk dana; dan
4. *Local organizational capacity* (kapasitas organisasi lokal). Proses pemberdayaan masyarakat harus berisikan peningkatan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama, mengembangkan dan memperkuat organisasi lokal, serta memobilisasi sumber daya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang merupakan kepentingan bersama.

Pitana (1999:76) melihat pembangunan pariwisata kerakyatan berbeda dengan pariwisata konvensional. Pembangunan ini lebih dikenal dengan model *bottom up*, pembangunan sebagai *social learning* menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengelolaannya.

Menurut Korten (dalam Pujaastawa, 2002: 16) menyatakan tiga alasan dasar mengenai pentingnya *community management* dalam pembangunan. Pertama, adanya *local variety* (variasi

lokal) yang tidak dapat diberikan perlakuan sama, di mana situasi daerah yang berbeda menuntut sistem pengelolaan yang berbeda sehingga masyarakat lokal yang paling memahami situasi daerahnya. Kedua, adanya *local resources* (sumber daya lokal) yang secara tradisional telah dikelola oleh masyarakat setempat dari generasi ke generasi, pengambilan pengelolaan akan menimbulkan ketersinggungan bila tidak melibatkannya. Ketiga, adanya *local accountability* (tanggung jawab lokal) yang berarti bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya lebih bertanggung jawab, karena berbagai hal yang dilakukan terhadap sumber daya akan berpengaruh langsung terhadap mereka.

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata diartikan sebagai keterlibatan secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengevaluasian, dan penikmatan hasilnya (Pitana, 1999 : 78). Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut menjadi kontrol yang sangat efektif dan menjamin pengembangan suatu obyek wisata sesuai dengan perencanaan. Pengaturan ketentuan tentang daya tampung suatu obyek wisata harus dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat lokal dan tidak berdasarkan atas kepentingan seseorang atau golongan

Pembangunan berbasis komunitas merupakan paradigma alternatif terhadap kegagalan paradigma birokratis yang dianggap menciptakan ketergantungan masyarakat perdesaan terhadap birokrasi. Atas dasar itulah, Korten (1986), memperkenalkan paradigma kerakyatan (*people centered development*). Korten mengungkapkan bahwa pembangunan kerakyatan adalah sebagai produk dan prakarsa kreatif masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan pemberdayaan. Moeljarto (1993:26) dalam teori manajemen komunitas, pengelolaan sumber daya yang bertumpu pada komunitas. Dalam pengoperasian pengelolaan manajemen komunitas, mengacu kepada tiga alasan mendasar yang dikemukakan oleh Korten (1986:5), yaitu:

1. *Local variety*, maksudnya variasi kehidupan masyarakat lokal ataupun kehidupan yang berbeda menuntut sistem pengelolaan yang berbeda, tidak dapat diberikan perlakuan sama dan masyarakat lokal yang paling akrab dengan situasinya.
2. *Local Resource*, artinya sumber daya secara tradisional dikuasai dan dikelola oleh masyarakat setempat.

3. *Local Accountability*, yaitu tanggung jawab lokal, yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya lebih bertanggung jawab karena kegiatan yang dilakukan secara langsung akan mempengaruhi hidupnya

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993). Desa Wisata (rural tourism) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur - unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (Joshi, 2012) dalam Antara dan Sukma Arida, 2015.

Baiquni (2005) menyatakan bahwa satu hal penting yang diabaikan dalam pengembangan desa wisata adalah persoalan kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata. Pendekatan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan lokal (pemerintah daerah dan masyarakat) memiliki spektrum konsep dan pendekatan yang bervariasi. Ada lima aspek dan pendekatan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu desa wisata, yaitu *holistic approach*, *participatory learning*, *empowerment of management*, *action research*, dan *sinergy and network*, yang masing-masing aspek tersebut dijelaskan seperti berikut. *Holistic approach*. Pendekatan ini melihat secara menyeluruh dimensi pembangunan atau secara holistic, *Participatory learning* merupakan pendampingan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan lokal perlu dilakukan secara partisipatif, menggali bersama kebutuhan dan merumuskan prioritas penanganan dalam proses 'belajar bersama', *Empowerment of management*, sebagai proses pembelajaran partisipatif mencakup individual dan institusional. Dalam proses belajar akan menimbulkan pencerahan (*enlightment*) dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*). Kelembagaan yang kuat terdiri dari para pelakunya yang juga tercerahkan dalam belajar dan bekerja. Manajemen kelembagaan yang terus membangun pencerahan dan pemberdayaan akan memberikan perbaikan kinerja dalam pengembangan desa wisata. *Action research*, riset aksi merupakan bagian yang saling melengkapi dalam pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan. Metode riset aksi dilakukan melalui proses pembelajaran dapat diperkaya dengan pengalaman lapangan. *Sinergy and network*. Pendekatan yang penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan adalah kesediaan untuk membuka jaringan dan bekerja secara jejaring dengan segenap komponen kelembagaan, untuk menciptakan keseimbangan *check and balance*, dan membangun *trust* diantara pelaku pembangunan desa wisata.

Sujarto (1989) menjelaskan bahwa reformasi di Indonesia mengakibatkan pergeseran paradigma pembangunan dengan model top down planning menjadi bottom up planning. Paradigma ini muncul di berbagai sektor pembangunan termasuk dalam bidang pembangunan pariwisata. Kedua model pembangunan ini banyak didiskusikan oleh kalangan akademisi maupun praktisi, namun hingga kini belum menghasilkan suatu konklusi. Untuk negara yang

sedang berkembang di mana infrastruktur organisasi perencanaan yang masih sangat lemah dan juga kemampuan sumber daya manusia yang belum merata, ada kecenderungan untuk menggabungkan kedua sistem pendekatan tersebut.

Di sektor pariwisata, model pembangunan *bottom up planning*, sejalan dengan paradigma pariwisata yang bercirikan kerakyatan, dan memunculkan berbagai sebutan yaitu: pariwisata inti rakyat, pariwisata kerakyatan, *resource community base management* atau *community management* (Korten,1986), sehingga akhirnya mengarah pada pengembangana desa wisata, desa wisata terpadu., dan Wisata Perdesaan sebagai salah satu bentuk pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memiliki pasar tersendiri (Adhisakti, 2000). Paradigma pariwisata kerakyatan dalam berbagai bentuknya telah lama menjadi paradigma alternatif sebagai kegagalan model modernisasi yang diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang memiliki banyak kelemahan karena selalu mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kurang memperhatikan masalah sosial budaya masyarakat. Terkait dengan pemikiran tersebut, maka desa-desa yang memiliki keunikan mulai dilirik untuk dipersiapkan menjadi desa wisata maupun wisata perdesaan oleh pemerintah maupun pelaku-pelaku pariwisata

Penelitian Putra (2000) dalam dalam Antara dan Sukma Arida, 2015 tentang “Pengembangan Model Pariwisata Pedesaan sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan” menyatakan bahwa pada dasarnya pariwisata pedesaan masih dikategorikan sebagai model pariwisata baru yang dikenal dengan nama pariwisata minat khusus (*special interest tourism*). Pariwisata pedesaan lebih mengedepankan derajat keunikan dan kekhasan dari suatu daerah, baik dalam kondisi alam lingkungannya, lingkungan sosial maupun budaya. Secara rinci disebutkan potensinya berupa topografi tanahnya berupa perbukitan, persawahan yang indah dan membentang, lahan pertanian dan ladang yang subur dengan ditunjang berbagai jenis kerajinan dan kesenian yang dilakukan oleh masyarakatnya. Potensi yang belum dikembangkan dapat dikemas menjadi paket produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan asing, sehingga dapat sebagai alternatif pekerjaan serta menambah pendapatan masyarakat setempat

### **III. METODE PENELITIAN**

Data hasil penelitian yang dilakukan di Desa Wisata Bayunggede Kabupaten Bangli dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus POKDARWIS Bayunggede, warga masyarakat dan pengurus desa seperti Kepala Desa, Kelian Dinas, kelian adat dan tokoh masyarakat. Teknik penentuan responden dilakukan secara purposive sampling untuk sampel kepala desa, pengurus adat dan dinas, tokoh masyarakat dan pengurus pokdarwis. Sedangkan sampel masyarakat ditentukan dengan teknik accidental sampling.

Data hasil penelitian yang terkumpul berupa data kualitatif baik berupa data primer maupun data sekunder. Data data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Bayunggede, dan dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum tentang pengelolaannya.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Potensi Desa Wisata Bayunggede

Desa Wisata Bayunggede merupakan salah satu daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli. Desa wisata ini telah dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan potensi wisata yang ada. Sebagai daya tarik wisata perdesaan, Desa Wisata Bayunggede telah dikunjungi oleh Wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kondisi daya tarik wisata Desa Bayunggede dari aspek 4 A yaitu *attractions*, *amenities*, *accessibility* dan *ancillary services* sebagai berikut.

###### 1. Attractions

Desa Wisata Bayunggede memiliki keunikan kehidupan sosial budaya dan potensi alam sebagai atraksi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Atraksi budaya Desa Wisata Bayunggede seperti: *Pengutangan kau* (setra ari-ari), merupakan tempat khusus untuk menempatkan ari-ari bayi yang baru lahir. Ari-ari bayi di Desa Bayung Gede yang baru lahir tidak dikubur di pekarangan rumah, tapi digantung di pohon *bukak* dengan dibungkus tempurung kelapa pada tempat khusus yang disebut setra ari-ari (*pengutangan kau*). Setra ari-ari lokasinya di sebelah selatan pusat Desa Bayung Gede, tepatnya di samping jalan menuju *setra* (kuburan). Tempat tersebut merupakan sebuah hutan kecil yang ditumbuhi oleh pohon-pohon liar dan pohon bambu yang sekarang sudah ditebang. Lokasi setra ari-ari tidak jauh dari pemukiman penduduk, karena hanya dipisahkan oleh jalan antara setra ari-ari dengan pemukiman penduduk. Lokasi ini dikelilingi oleh jalan melingkar yang sudah dipaving dan bisa dilalui dengan bersepeda maupun mengendarai sepeda motor. Luas setra ari-ari tersebut  $\pm 60$  are. Ari-ari bayi yang baru lahir biasanya digantung di pohon di pinggir-pinggir hutan, sehingga mudah untuk dilihat. *Pengutangan kau* merupakan daya tarik utama desa wisata Bayunggede, disamping daya tarik budaya lainnya seperti arsitektur bangunan, karang salah kawin, organisasi adat dan upacara2 agama sesuai tradisi adat di Desa Bayunggede. Setra ari-ari, upacara melampuan, merupakan daya tarik wisata yang tidak akan ditemukan di daerah lainnya. Selain daya tarik wisata budaya, desa wisata ini juga memiliki daya tarik wisata pertanian (agrowisata jeruk).

## 2. Amenities

Fasilitas penunjang pariwisata yang telah dibangun di desa wisata Bayunggede untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung seperti loket donasi dan informasi wisata, tempat parkir, toilet yang telah dibangun sebanyak 3 buah di tempat parkir dan jalur menuju setra ari-ari. Selain itu juga sudah dibangun warung wisata, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Bayunggede. Desa wisata ini belum memiliki fasilitas pendukung seperti restoran, dan penginapan (*home stay*).

## 3. Accessibility

Dari sisi akses (*accessibility*) Desa Wisata Bayunggede telah terhubung dengan infrastruktur jalan yang bagus dan memadai yang dapat dilalui dengan berbagai jenis kendaraan seperti, bus, minibus dan mode kendaraan lainnya. Di desa wisata ini telah tersedia tempat parkir yang luas, yang bisa menampung kendaraan wisatawan yang berkunjung. Selain itu akses jalan dilingkungan desa sudah memadai, dengan pemasangan paving dan pembangunan trotoar di jalan utama menuju daya tarik setra ari- ari. Desa wisata Bayunggede sangat mudah di akses oleh wisatawan karena terletak Antara kawasan wisata Ubud dan daya tarik wisata kintamani (kawasan geopark dunia gunung api Batur).

## 4. Ancillary services

*Ancillary services* sebagai sebuah kelembagaan/organisasi yang mengelola desa wisata Bayunggede telah terbentuk Kelompo Sadar Wisata (POKDARWIS) pada tahun 2017. Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat dengan bimbingan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli. Keanggotaan kelompok POKDARWIS adalah anggota masyarakat Desa Wisata Bayunggede yang dipilih oleh masyarakat melalui perwakilan masyarakat/pengurus desa adat dan dinas.

Desa wisata Bayunggede telah dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan, asing maupun domestic. Aktivitas wisata yang rutin dilakukan di desa wisata ini adalah wisata bersepeda (*cycling*) yang dikemas oleh usaha jasa wisata Bali Adventure Tour (mason adventures) yang hamper setiap hari membawa wisatawan untuk berkunjung. Mason adventure mengemas paket wisata bersepeda Kintamani – Taro dengan mengambil start point (titik awal) di Desa Wisata Bayunggede. Selain Mason Adventures masih ada beberapa usaha jasa wisata yang memasukkan Desa Wisata Bayunggede sebagai daya tarik yang dijual dalam paket wisatanya seperti Panorama Tour, Floreza Tour dan lainnya. Kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Bayunggede selain diatur oleh usaha jasa perjalanan wisata, juga ada berkunjung secara mandiri berdasarkan informasi yang didapat di internet ataupun wisatawan lain yang sudah pernah berkunjung sebelumnya.

Perkembangan Desa Wisata Bayunggede belum optimal dan memberi manfaat ekonomi yang signifikan pada masyarakat, karena belum dikelolanya daya tarik dengan baik, baik pengembangan produk wisata maupun layanan wisata lainnya. Ada beberapa fasilitas penunjang pariwisata yang telah dibangun tidak berfungsi dengan baik, karena kurang perawatan dan akibat tidak ada petugas khusus yang merawat. Masyarakat melalui perangkat desa telah berupaya beberapa kali membentuk pengelola desa wisata Bayunggede namun belum berjalan optimal.

## **B. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Bayunggede**

Manajemen/pengelolaan yang dimaksud adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam mengelola Desa wisata Bayunggede, sebagai sebuah usaha jasa wisata dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjalankan fungsi tersebut. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Bayunggede merupakan usaha memberdayakan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan, sehingga memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik manfaat ekonomi, maupun manfaat untuk mendukung pelestarian alam dan budayanya. Dalam mengelola Desa Wisata Bayunggede, pemerintah desa telah membentuk kelompok sadar wisata pada tahun 2017. Kelompok ini dibentuk atas dorongan dan bimbingan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli dengan memberdayakan masyarakat local dalam pengelolaannya.

Namun dalam 2 tahun perjalanannya kelompok sadar wisata yang dibentuk untuk mengelola desa wisata Bayunggede belum berjalan optimal, malah dalam satu tahun terakhir cenderung mengalami kepakuman dalam kegiatannya. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Bayunggede akan dijabarkan berdasarkan fungsi pengelolaan/manajemen yaitu:

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan. Fungsi ini sangat penting sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengelolaan selanjutnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelompok sadar wisata Bayunggede (Pokdarwis Bayunggede) yang ditugaskan untuk mengelola desa wisata Bayunggede sejak terbentuk belum memiliki perencanaan yang jelas dan detail dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Perencanaan pengelolaan tersebut baik meliputi pengembangan dan pengemasan produk serta pengembangan sumber daya manusia, maupun pengembangan fasilitas pendukung pariwisata. Lemahnya perencanaan tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada di POKDARWIS Bayunggede, dan bimbingan dari para pihak yang berkompeten dalam menyusun perencanaan. Selain keterbatasan sumber daya manusia, perencanaan pengembangan desa wisata bayunggede juga dihadapkan pada permasalahan pendanaan dalam penyusunan rencana yang melibatkan

pihak luar. Oleh karena itu POKDARWIS BAYunggede sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari praktisi dan akademisi dalam menyusun perencanaan pengembangan desa wisata bayunggede. Rencana pengembangan yang selama ini dibuat berdasarkan hasil pembahasan POKDARWIS Bayunggede belum pernah ditetapkan dan dijabarkan secara detail, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak konsisten dan cenderung berubah-ubah. Hal ini terlihat dari rencana penataan hutan bambu, yang sudah sempat ditata dengan melibatkan masyarakat dan menghabiskan biaya yang cukup banyak, saat ini terbengkalai tidak ada kelanjutan dalam pengembangannya. Hal ini terjadi karena tidak jelasnya rencana pengembangan hutan bambu sebagai daya tarik wisata di Desa Wisata Bayunggede. Selain itu program pengembangan warung wisata yang telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung, saat ini juga terbengkalai karena perencanaan detailnya belum ditetapkan, sehingga dalam perjalanannya terjadi silang pendapat di antara anggota dan pengurus POKDARWIS Bayunggede.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi pengelola Desa Wisata Bayunggede saat ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Bayunggede yang dibentuk oleh masyarakat. Pokdarwis Bayunggede sudah memiliki Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan struktur organisasi, namun belum bisa berjalan dengan optimal dalam mengelola desa wisata. Ada beberapa permasalahan dalam penyusunan organisasi dan pembentukan Pokdarwis Bayunggede antara lain:

- a. Perekrutan anggota Pokdarwis yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat hanya melihat latar belakang pendidikan, pekerjaan dan mengabaikan kesanggupan dalam menjalankan tugas.
- b. Jumlah anggota Pokdarwis Bayunggede jumlahnya cukup banyak sebanyak 45 orang, dan sebagian bekerja diluar Desa Bayunggede, sehingga kehadiran anggota dalam suatu kegiatan tidak bisa maksimal.
- c. Terbatasnya dana dari pendapatan untuk membiayai petugas penjaga loket dan penjaga warung wisata, sehingga petugas yang ditugaskan untuk menjaga loket dan warung, tidak bisa bekerja cukup lama dengan gaji yang belum sesuai harapan. Saat ini tidak ada petugas penjaga loket dan warung wisata, karena sudah 2 kali pengangkatan petugas, mereka sudah mengundurkan diri.

POKDARWIS Bayunggede sebagai pengelola Desa Wisata Bayunggede dalam pembentukannya telah memberdayakan masyarakat local dala pengelolaannya. Hal ini terlihat dari keanggotaan kelompok sadar wisata semuanya berasal dari warga masyarakat bayunggede. Struktur organisasi Pokdarwis terdiri dari Penasehat, Pembina, Ketua, Wakil

ketua, Sekretaris, Bendahara dan 5 seksi. Bagian (seksi) yang ada dalam struktur organisasi POKDARWIS Bayunggede terdiri dari seksi keamanan dan ketertiban, seksi kebersihan dan keindahan, seksi daya tarik dan kenangan, dan seksi hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, serta seksi pengembangan usaha.

### 3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan sebagai fungsi pimpinan dalam mengerakkan roda organisasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan belum adanya kegiatan yang dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Fungsi pengelolaan ini belum berjalan dengan baik karena belum ditetapkannya secara detail fungsi perencanaan yang harus dibuat oleh masing-masing seksi dalam mengelola Desa Wisata Bayunggede.

### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan Desa Wisata bayunggede belum berjalan dengan baik, hal tersebut terjadi karena belum adanya rencana detail pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Bayunggede yang akan dilakukan oleh POKDARWIS Bayunggede. Pengawasan sebagai fungsi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pokdarwis Bayunggede, tidak digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan sesuai rencana guna mencapai tujuan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat dilakukan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan kelompok sadar wisata bayunggede.

Dalam pengelolaan Desa Wisata Bayunggede oleh Kelompok Sadar Wisata menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan kurangnya kesadaran anggota. Kendala tersebut menyebabkan fungsi manajemen dalam pengelolaan tidak berjalan dengan baik, untuk mencapai tujuan meningkatkan manfaat ekonomi pariwisata, pelestarian alam dan budaya.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Desa wisata Bayunggede memiliki potensi wisata yang sangat unik yang tidak dijumpai ditempat lain seperti potensi budaya *pengutangan kau* (setra ari-ari bayi), arsitektur bangunan dan juga potensi wisata pertanian perkebunan jeruk masyarakat. Dalam pengelolaannya Desa Wisata Bayunggede telah dilakukan dengan memberdayakan masyarakat local dengan membentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS Bayunggede) pada tahun 2017 yang beranggotakan masyarakat setempat. Pengelolaan Desa Wisata Bayunggede yang dilakukan oleh POKDARWIS Bayunggede belum berjalan dengan baik berdasarkan fungsi manajemen.

## Daftar Pustaka

- Antara, Made dan Sukma Arida. 2015. Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal. Konsorsium Riset Universitas Udayana.
- Korten, David C. 1986. *Community Management : Asian Experince and Perspective*. Connecticut: Kumarian Press
- Moeljarto, T. 1993. *Politik Pembangunan – sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Thun 2019-2025
- Peraturan Bupati Bangli, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa Wisata di Akbupaten Bangli.
- Pitana, I Gde. 1999. *A Community Management dalam Pembangunan Pariwisata*, Majalah Ilmiah Pariwisata – Analisis Pariwisata Vol. 2. Program Studi Pariwisata. Universitas Udayana.
- Pitana, I Gde dan I Nyoman Putra, 2011. *Pemberdayaan & Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Pujaastawa, I.B.G. 2002. *Pola Pembangunan Pariwisata Terpadu Bertumpu pada Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Bali Tengah*. Laporan Riset Kementerian Riset dan Teknologi RI. Jakarta: LIPI
- Sonder, I Wayan. 2016. Potensi Budaya Sebagai Daya Tarik di Desa Bayunggede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Jurnal ilmiah Pariwisata dan Budaya IHDN Denpasar Volume I nomor 2 tahun 2016.